

**MINORITAS DI BAWAH PAYUNG KONSTITUSI:
STUDI KOMPARASI KONSTITUSI DAN IMPLEMENTASI HAK-HAK
AGAMA MINORITAS DI MESIR DAN INDONESIA**



Oleh:

Desthy Umayah Adriani, S.S,

NIM: 17200010144

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
TESIS
YOGYAKARTA**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Art (M.A.)
Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi Kajian Timur Tengah**

**YOGYAKARTA
2021**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-851/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : MINORITAS DI BAWAH PAYUNG KONSTITUSI: STUDI KOMPARASI KONSTITUSI DAN IMPLEMENTASI HAK-HAK AGAMA MINORITAS DI MESIR DAN INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DESTHY Umayah Adriani, S.S
Nomor Induk Mahasiswa : 17200010144
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 61e12cd3d8e92



Penguji II

Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.
SIGNED

Valid ID: 61f12393d5765



Penguji III

Dr. Roma Ulinnuha, S.S., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f1220708ad1



Yogyakarta, 28 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61f1fb6e699ca

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Desthy Umayah Adriani, S.S.**
NIM : 17200010144
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 14 Desember 2021



Desthy Umayah Adriani, S.S.
NIM: 17200010144



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Desthy Umayah Adriani, S.S.**
NIM : 17200010144
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Desember 2021

nyatakan,



Handwritten signature of Desthy Umayah Adriani, S.S.

Desthy Umayah Adriani, S.S.

NIM: 17200010144



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**MINORITAS DI BAWAH PAYUNG KONSTITUSI:
STUDI KOMPARASI KONSTITUSI DAN IMPLEMENTASI HAK-HAK
AGAMA MINORITAS DI MESIR DAN INDONESIA**

Yang ditulis oleh:

Nama : Desthy Umayah Adriani
NIM : 17200010144
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Desember 2021

Pembimbing



Dr. Nina Mariani Noor, Ss., MA

ABSTRAK

Tesis ini merupakan studi komparasi terkait hak-hak minoritas pada Konstitusi Republik Arab Mesir dan Republik Indonesia. Berangkat dari beberapa isu diskriminasi, kriminalisasi, dan kekerasan yang dialami sejumlah kelompok minoritas di kedua negara, tesis ini juga mengulas tentang implementasi dari hak-hak minoritas pada kedua konstitusi tersebut dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat di Mesir dan Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam studi mengenai jaminan hak konstitusional warga negara, khususnya kelompok minoritas, yang dilakukan oleh negara. Peneliti mengkaji naskah konstitusi Mesir dan Indonesia dan melakukan analisis melalui konten media terkait isu-isu diskriminasi, kriminalisasi, dan kekerasan yang telah dialami oleh kelompok minoritas di kedua negara.

Kesimpulan tesis ini menunjukkan bahwa konstitusi haruslah dapat mengikuti perkembangan zaman, atau sebagai *living constitution*, agar terus disesuaikan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan-kebutuhan baru yang mungkin akan timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konstitusi Republik Indonesia dan Republik Arab Mesir, ketentuan tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama dinilai telah terakomodir dengan baik. Namun pada implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak ditemui beberapa pelanggaran HAM, khususnya terkait kebebasan beragama.

Kata Kunci: Koptik, Minoritas, Konstitusi, Ahmadiyah, Diskriminasi

MOTTO

“There are many things that seem impossible only so long as one does not attempt them.”

(Andre Gide, Autumn Leaves)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya dan diri saya sendiri.

“Terima kasih untuk tidak menyerah dan menyelesaikan apa yang sudah kau mulai”



KATA PENGANTAR

Memulai sesuatu adalah hal yang mudah, namun konsisten untuk terus melakukan apa yang telah dimulai dan menyelesaikannya tepat waktu terkadang menjadi musuh terbesar bagi sebagian orang. Oleh karena itu, penulis memanjatkan puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena atas berkah dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan dukungan penuh dari orang-orang baik yang sangat luar biasa.

Penulisan tesis dengan judul **“Minoritas di bawah Payung Konstitusi: Studi Komparasi Konstitusi dan Implementasi Hak-Hak Agama Minoritas di Mesir dan Indonesia”** tidak akan selesai tanpa adanya berbagai dukungan dan bantuan dari banyak pihak, terutama keluarga, Bapak dan Ibu Dosen, civitas akademika UIN Sunan Kalijaga, sahabat, dan para kolega. Oleh karena itu, pada penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus atas segala dukungan, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan selama penyusunan tesis ini.

Pertama, terima kasih penulis yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Nina Mariani Noor, Ss., MA selaku dosen pembimbing yang dalam proses penulisan tesis ini. Berbagai kritik, saran, dukungan, dan motivasi dari beliau sangatlah berarti dan penting dalam mengajarkan penulis akan pentingnya kontribusi keilmuan dari sebuah karya tulis. Terima kasih pula kepada Bapak Prof. Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A. yang telah menjadi dosen pembimbing akademik penulis selama melakukan studi di Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Berkat bimbingan beliau pula lah, penulis dapat menimba ilmu dengan nyaman dan penuh gairah keilmuan selama menjalani perkuliahan di konsentrasi Kajian Timur Tengah.

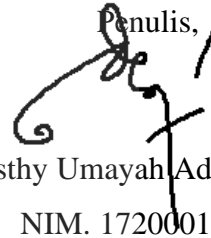
Kepada seluruh pejabat, civitas akademik UIN Sunan Kalijaga, dan teman-teman di Kajian Timur Tengah, syukur dan terima kasih yang dalam juga saya curahkan atas seluruh bantuan dan dukungannya selama menjalankan studi magister di Sekolah Pascasarjana UIN

Sunan Kalijaga. Penulis tidak akan berada di posisi saat ini tanpa adanya dukungan dari bantuan dari seluruh pihak.

Selanjutnya, penulis berharap semoga tesis ini mambawa manfaat dan menambahkan wawasan mengenai studi konstitusi dan minoritas. Penulis sepenuhnya sadar bahwa tesis ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan baik dari segi teknis penulisan maupun muatan substansi. tesis ini juga masih memiliki beberapa celah yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Karenanya, kritik dan saran yang membangaun untuk penulis akan sangat dihargai.

Jakarta, 15 Desember 2021

Penulis,



Desthy Umayah Adriani, S.S.

NIM. 17200010144



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritis	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II.....	12
Sejarah Konstitusi dan Demografi Singkat Negara Mesir dan Indonesia.....	12
A. Pengertian Konstitusi.....	12
B. Sejarah Konstitusi Mesir dan Indonesia.....	13
1) Sejarah Konstitusi Mesir.....	13
2) Sejarah Konstitusi Indonesia.....	18
C. Demografi Negara Mesir dan Indonesia	25
1) Demografi Mesir	26

2) Demografi Indonesia	27
BAB III	29
Pengaturan Hak Beragama dalam Konstitusi Mesir dan Indonesia	29
A. Hak Asasi Manusia	29
B. Pengaturan Hak Beragama dalam Konstitusi Mesir	30
C. Pengaturan Hak Beragama dalam Konstitusi Indonesia	34
BAB IV	36
Tantangan Hak Beragama dalam Kehidupan Bermasyarakat di Mesir dan Indonesia	36
A. Tantangan Hak Beragama dalam Kehidupan Bermasyarakat di Mesir.....	37
B. Tantangan Hak Beragama dalam Kehidupan Bermasyarakat di Indonesia	40
BAB V	44
PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45
Daftar Riwayat Hidup	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang bersifat universal dan melekat erat dengan setiap individu manusia sejak mereka terlahir ke dunia. Istilah HAM sendiri merupakan suatu produk sejarah yang muncul dari keinginan kuat manusia untuk memperoleh dan melindungi hal-hak dasarnya. Isu HAM sendiri seringkali berkembang dan berkaitan dengan realitas sosial dan politik. Terdapat pemahaman umum bahwa melindungi warga negara merupakan salah satu kewajiban suatu negara terhadap warganya. Namun upaya perlindungan tersebut tidak akan berjalan mulus jika setiap warga negara tidak memahami dengan baik hak dan kewajiban yang dimilikinya dalam berbangsa dan bernegara. Walaupun mayoritas negara menuangkan tentang perlindungan hak dan kewajiban setiap warga negaranya ke dalam konstitusi, masih banyak ditemukan kendala dan hambatan dalam penerapan ketentuan tersebut di kehidupan bermasyarakat, terutama pada kelompok masyarakat minoritas.

Konflik antar kelompok mayoritas-minoritas bukanlah hal yang baru dalam sejarah kehidupan umat manusia, terutama antar kelompok agama. Meningkatnya insiden konflik antar agama telah menarik banyak perhatian para cendekiawan dan pembuat kebijakan. Beragam pertanyaan akan faktor-faktor yang mendasari konflik-konflik ini telah dilakukan dengan berbagai pendekatan mulai dari isu personal, geopolitik, dan beberapa faktor lainnya.

Peran agama dalam proses demokratisasi suatu negara pun telah menjadi agenda politik populer di abad ini. Integrasi negara dan agama dalam perancangan konstitusi bukanlah hal yang baru. Kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi tidak semata menjamin kebebasan dalam praktik beragama terutama bagi kelompok minoritas.

Pemahaman dan edukasi terkait konstitusi merupakan salah satu upaya yang dapat diterapkan dalam menjamin perlindungan hak-hak beragama kelompok minoritas.

Kasus-kasus diskriminasi terhadap penganut agama minoritas banyak terjadi, tidak terkecuali di negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti di Timur Tengah atau Indonesia. Beragam kejadian yang dapat disebutkan antara lain diskriminasi yang dialami penganut Kristen Koptik di Mesir dan beberapa isu yang dihadapi para penganut agama minoritas di Indonesia, salah satunya minoritas muslim Ahmadiyah.

Kelompok minoritas Kristen Koptik di Mesir dinilai unik dan menarik untuk dibahas. Koptik sendiri adalah bentuk utama dari Kekristenan di Mesir. Kristianitas pertama masuk ke Mesir dibawa oleh seorang Evengelista bernama St. Mark antara tahun 43-48M tepatnya di Alexandria. Hal ini menjadikan gereja Koptik sebagai salah satu gereja tertua dalam dunia Kekristenan. Koptik Mesir juga digambarkan sebagai minoritas Kristen Timur Skismatik^{1 2} dan berpegang pada paham monofisitisme³ pasca Konsili Kalsedon (451M)^{4 5} yang diikuti oleh gelombang baru penganiayaan oleh sesama rekan Kristian dan penguasa Romawi.

Ketika bangsa Arab datang pada abad ketujuh, Mesir dikenal sebagai "*Dar-al-Qibt*" (rumah orang-orang Koptik). Koptik sendiri menjadi terminologi yang digunakan untuk membedakan Kristen Mesir dan penduduk asli Muslim. Secara etnis, orang Koptik bukan merupakan bangsa Semit atau Hamit tetapi dapat digambarkan sebagai keturunan ras Mediterania yang memasuki lembah Nil dalam waktu yang tidak tercatat. Simon Leeder dalam studinya mengatakan terdapat kemungkinan bahwa orang Koptik adalah penerus

¹Katolisitas Indonesia, "Skisma Timur," n.d., accessed April 23, 2018, <http://katolisitas-indonesia.blogspot.com/2012/07/skisma-timur.html>.

² Skisma Timur dan Barat adalah bentuk dari perpecahan Kekristenan Kalsedon, yakni Katolisitas Barat dan Ortodoksi Timur

³ Neal, Ryan A. "Monophysitism." *The Encyclopedia of Christian Civilization* (2012): Kepercayaan bahwa Tuhan dan Yesus melebur dalam suatu pribadi yang satu

⁴Aziz Suryal Atiya, *The Copts and Christian Civilization* (University of Utah Press, 1979).

⁵ Konsili yang berlangsung di Kalsedon, Istanbul, ini menolak doktrin monofisitisme dan menetapkan pengakuan Iman Kalsedon yang menggambarkan kemanusiaan penuh dan keilahian penuh dari Yesus, pribadi kedua dari Tritunggal Kudus.

bangsa Mesir Kuno dan terkadang didefinisikan sebagai “*Modern Son of the Pharaohs*”⁶. Para dieken⁷ dan orang awam mengklaim bahwa melodi dari himne yang dinyanyikan oleh penganut Koptik merupakan melodi yang sama dengan yang dinyanyikan oleh masyarakat Mesir Kuno ketika menyambut kedatangan Firaun dari perang⁸.

Pada awal era kedatangan Islam di Mesir, penganut Koptik diperlakukan dengan baik. Namun seiring dengan jalannya peperangan pada masa kekuasaan Mamluk, pemberlakuan *jizyah* (pajak) atas Koptik yang dinilai terlalu tinggi menjadi sumber terbesar guna menyokong dana peperangan⁹¹⁰. Diskriminasi terhadap hak-hak penganut Koptik terus berlanjut dan semakin berkembang seiring dengan dimulainya keterlibatan gereja dalam agenda politik pemerintah Mesir.

Di Indonesia sendiri terdapat kelompok agama minoritas yang cukup menarik untuk diulas terkait pemenuhan hak-hak yang diperolehnya dalam beragama, yaitu minoritas muslim Ahmadiyah Indonesia. Berbeda dengan Kristen Koptik yang dinilai sebagai bentuk utama Kekristenan di Mesir, Ahmadiyah Indonesia merupakan bagian dari penganut Ahmadiyah yang ada di skala global dan merupakan kelompok agama minoritas di Indonesia.

Terdapat beberapa versi kronologi awal mula masuknya Ahmadiyah ke Indonesia. Namun diketahui bahwa Ahmadiyah masuk melalui para siswa Indonesia yang kembali dari sekolah Ahmadiyah di India, antara tahun 1920-1942. Ahmadiyah sendiri diperkenalkan langsung oleh tokoh Ahmadiyah, Prof. Maulana H. Kwadja Kamaluddin, pada tahun 1920.¹¹ Terdapat dua paham Ahmadiyah di Indonesia, yaitu Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah

⁶Simon Henry LEEDER, *Modern Sons of Pharaoh: A Study of the Manners and Customs of the Copts of Egypt... Illustrated with Photographs, Etc* (Hodder & Stoughton, 1918).

⁷(Istilah dalam Gereja Katolik, Anglikan, dan Ortodoks) pendeta yang ditahbiskan sebagai peringkat di bawah Imam.

⁸Omotayo O. Banjo and Kesha Morant Williams, *Contemporary Christian Culture: Messages, Missions, and Dilemmas* (Lexington Books, 2017).

⁹Cornelis Hulsman and Ramez Atallah, “Egypt—the Church under Pressure,” *Freedom of Belief and Christian Mission* (2015).

¹⁰Cornelis Hulsman, Editor-in-chief Arab-West Report, and Studying Muslim-Christian, “Middle Eastern Christian Survival Strategies after the Arab Revolutions in 2011 with a Focus on Egypt” (n.d.): 25.

¹¹Zulkarnain, Iskandar. Gerakan ahmadiyah di indonesia. Lkis Pelangi Aksara, 2005, hlm. 169

Lahore. Ahmadiyah Lahore kini menjadi organisasi berbadan hukum dengan nama Gerakan Ahmadiyah Indonesia Centrum Lahore, sementara Ahmadiyah Qadian saat ini lebih dikenal dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Walaupun agama dan politik sering kali dinilai sebagai dua sisi mata uang yang tidak bisa terlepas, Ahmadiyah Indonesia menegaskan sikapnya terhadap politik yaitu: (1) Ahmadiyah bukan Gerakan politik dan tidak mencampuri perjuangan politik apa pun dan dimanapun, sekalipun Gerakan Ahmadiyah menyadari akan pentingnya perjuangan politik, dan (2) Gerakan Ahmadiyah tidak akan merampas hak politik para anggotanya, selama gerakan politik tersebut tidak bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹² Oleh karena itu, berbeda dengan Koptik Mesir yang mana gereja Koptik ikut terlibat dalam agenda politik pemerintah, Ahmadiyah mengklaim bahwa kelompok mereka murni merupakan kelompok agama.

Meskipun demikian, perbedaan penafsiran antara mayoritas penganut agama Islam di Indonesia dan Jemaat Ahmadiyah tentang “*khataman nabiyyin*” (nabi terakhir) menjadikan Ahmadiyah dianggap sebagai aliran Islam yang sesat.¹³ Dengan adanya perbedaan penafsiran tersebut dengan mayoritas muslim di Indonesia, pemahaman Ahmadiyah menimbulkan kontroversi dan mengundang reaksi keras. Hal ini menjadikan Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai kelompok minoritas yang sering kali menjadi objek dari kekerasan dan kriminalisasi dalam beragama dan bermasyarakat.

Dengan memperhatikan beberapa pelanggaran HAM khususnya terkait kebebasan beragama yang dialami oleh kelompok minoritas Koptik Mesir dan Ahmadiyah Indonesia, penelitian terkait peran negara, khususnya konstitusi, yang merupakan landasan hukum suatu negara, menjadi menarik untuk dibahas dan dikomparasikan. Khususnya untuk mengetahui

¹² Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, 261

¹³ Noor, Nina Mariani, Siti Syamsiyatun, and J. B. Banawiratma. "In search of peace: Ahmadi women's experiences in conflict transformation." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2015): 61-82.

bagaimana konstitusi Mesir dan Indonesia dalam mengakomodir hak beragama setiap warganya.

Penelitian ini akan menjelaskan secara komparatif bagaimana konstitusi Negara Mesir dan Republik Indonesia mengatur hak beragama bagi setiap warga negaranya dan penerapannya dalam realita kehidupan sosial. Fokus analisis dalam penelitian ini adalah hak-hak konstitusional minoritas muslim Ahmadiyah di Indonesia dan minoritas Koptik di Mesir. Penelusuran ini nantinya akan dimulai dengan tinjauan sejarah konstitusi serta demografi Mesir dan Indonesia. Dilanjutkan dengan pembahasan pengaturan hak beragama dalam konstitusi Mesir dan Indonesia serta implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah perancangan konstitusi di Mesir dan Indonesia?
2. Apa saja hak-hak dan kebijakan konstitusional yang diberikan pemerintahan Mesir dan Indonesia kepada warga negaranya dalam hal kebebasan beragama?
3. Bagaimana pengimplementasian hak-hak konstitusional tersebut dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini berupaya untuk melakukan komparasi terhadap konstitusi Mesir dan Indonesia dalam mengakomodir hak-hak warga negaranya, khususnya terkait kebebasan beragama. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk menginvestigasi perkembangan praktik beragama yang terjadi dalam realita kehidupan bermasyarakat. Melalui fenomena ini, studi ini juga bermaksud untuk menguraikan lebih lanjut tentang bagaimana hak beragama setiap individu telah diatur dan dilindungi oleh negara.

Adapun pada ranah akademis, tesis ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memperkaya diskusi mengenai HAM, khususnya terkait kebebasan beragama, dan pemahaman atas hak dan kewajiban warga negara yang sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Peneliti melihat bahwa penetapan HAM pada teks konstitusi tidaklah cukup. Karena pada realitanya, dalam kehidupan bermasyarakat secara global, masih banyak terdapat pelanggaran HAM, diskriminasi, dan kriminalisasi, khususnya terhadap para kelompok minoritas, yang terjadi baik pada tingkatan nasional maupun internasional.

D. Kajian Pustaka

a. Identitas Sosial

Beberapa peneliti melihat bahwasanya konflik antar agama seringkali dipicu oleh perbedaan identitas sosial. Zuhairi Misrawi menilai bahwa pluralitas agama, suku, budaya, dan bahasa menimbulkan kekhawatiran publik, terutama perihal maraknya intoleransi dan konflik antar agama yang terjadi di Indonesia.¹⁴ Misrawi menilai bahwasanya multikulturalisme adalah sebuah keniscayaan dan penting dalam menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam penelitiannya, Misrawi membandingkan multikulturalisme yang ada di Indonesia dan Mesir dengan menggunakan barometer multikulturalisme. Barometer ini dijadikan pijakan untuk melihat sejauh mana multikulturalisme dan monokulturalisme dipraktikkan dalam suatu masyarakat.

Gazi berpendapat bahwa identifikasi sosial, orientasi dominasi sosial, dan persepsi keteramcaman dapat berpengaruh secara signifikan terhadap dukungan akan kekerasan. Penelitian ini melihat fenomena hubungan antara Muslim Sunni mayoritas dan kelompok minoritas Ahmadiyah dan Syiah.¹⁵ Identifikasi sosial yang tampak sangat kuat dalam

¹⁴Zuhairi Misrawi, "Kesadaran multikultural dan deradikalisasi pendidikan Islam: pengalaman Bhinneka Tunggal Ika dan Qabul al-Akhar," *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (January 1, 1970): 197.

¹⁵Gazi, "Menguji Pengaruh Identitas Sosial, Orientasi Dominasi Sosial, Persepsi Keteramcaman Terhadap Dukungan Atas Kekerasan" (n.d.): 88.

penelitian ini adalah perbedaan *mazhab* atau kepercayaan suatu kelompok agama. Dalam konteks ini, Ahmadiyah dinilai telah menodai ajaran Islam dengan mempercayai bahwa Muhammad bukanlah nabi dan rasul terakhir. Perbedaan persepsi yang menimbulkan identitas berbeda dengan kelompok muslim lainnya ini memicu kekerasan dan diskriminasi, seperti yang dialami oleh kelompok Ahmadiyah.

Sedikit berbeda dengan Gazi dan Misrawi, Sidanius melihat identifikasi sosial dalam skala yang lebih besar yaitu antara Barat dan dunia Arab.¹⁶ Didukung oleh adanya perbenturan nilai dan kebudayaan, perselisihan dan tindak kekerasan yang terjadi antara Barat dan dunia Arab dapat dirasakan oleh masyarakat universal. Identifikasi sosial di dunia Arab menghasilkan beberapa kelompok islam fundamental seperti al-Qaeda dan ISIS. Konflik panjang yang tak kunjung usai ini pun diwarnai oleh banyak aksi terorisme dan perang *proxy*.

b. Dominasi Sosial

Dalam penelitiannya, Sidanius dan kawan-kawan menemukan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan oleh gerakan Islam resisten di Arab seperti Hamas dan Hizbullah adalah bentuk dari perlawanan terhadap dominasi Barat, khususnya militer Amerika, di Arab.¹⁷ Sepaham dengan Sidanius, Shana Levin¹⁸ dalam penelitiannya terhadap masyarakat Lebanon, berpendapat bahwa orientasi dominasi sosial memberikan pengaruh besar pada tindak kekerasan khususnya dalam kasus tragedi *World Trade Centre* (WTC) yang terjadi pada 11 September 2001 silam.

Sementara itu, Yoyok dalam penelitiannya mendeskripsikan bagaimana dominasi sosial masyarakat Muslim Arab berpengaruh terhadap identitas sosial minoritas Koptik di

¹⁶Jim Sidanius et al., "Support for Asymmetric Violence among Arab Populations: The Clash of Cultures, Social Identity, or Counterdominance?," *Group Processes & Intergroup Relations* 19, no. 3 (May 2016): 343–359.

¹⁷Ibid.

¹⁸Shana Levin et al., "Social Dominance and Social Identity in Lebanon: Implications for Support of Violence Against the West," *Group Processes & Intergroup Relations* 6, no. 4 (October 2003): 353–368.

Mesir.¹⁹ Bahasa Arab menjadi tantangan tersendiri bagi identitas sosio-kultural Koptik Mesir. Penelitian tersebut mengambil dua kesimpulan utama. Pertama, penggunaan bahasa Arab secara formil pada abad ke-8 menggantikan bahasa Koptik, memberikan pengaruh terhadap identitas Koptik pada level sosio-kultural yang berimbas pada pengadopsian bahasa Arab menjadi integral dari identitas kultural Koptik yang baru. Kesimpulan kedua, pada level keagamaan yang paling terlihat adalah penerjemahan injil dari bahasa Koptik ke bahasa Arab. Penolakan terhadap penggunaan bahasa Arab, yang notabene identik dengan bahasa Islam tidak bisa dihindari lagi. Selain dari sisi kitab suci, bahasa Arab pun digunakan dalam ritual-ritual ibadah lainnya seperti pernikahan di gereja dan lain-lain.

E. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas rumusan permasalahan yang ada melalui tiga tahapan. Pertama, penulis akan melakukan identifikasi sosial terhadap minoritas Koptik dan mayoritas Muslim di Mesir dengan menggunakan Teori Identifikasi Sosial oleh Henry Tajfel & Turner (1974). Teori psikologi-sosial klasik ini akan digunakan untuk menjelaskan konflik antar kelompok sebagai fungsi dari *self-identification* berdasarkan identitas kelompok. Teori ini dilandasi oleh premis bahwa setiap individu mendefinisikan identitas diri mereka berdasarkan identitas kelompok sosial individu tersebut.²⁰

Selanjutnya penulis akan melihat orientasi dominasi sosial Muslim Mesir menggunakan teori Dominasi Sosial (*Social Dominance Orientation*) Tajfel & Turner (1974). Teori Dominasi Sosial menawarkan suatu asumsi bahwa konflik yang melanda banyak kelompok adalah hasil dari kecenderungan alami manusia untuk membentuk suatu sistem berbasis kelompok dan mendominasi kelompok lainnya²¹. Tindak dominasi ini kemudian

¹⁹Yoyo Yoyo, "PENGARUH BAHASA ARAB TERHADAP IDENTITAS SOSIO-KULTURAL DAN KEAGAMAAN MASYARAKAT KOPTIK DI MESIR," *Jurnal CMES* 10 (2017).

²⁰Henri Tajfel and John C. Turner, "The Social Identity Theory of Intergroup Behavior." (2004).

²¹Jim Sidanius and Felicia Pratto, *Social Dominance: An Intergroup Theory of Social Hierarchy and Oppression* (Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 1999).

akan berbenturan dengan *counter-dominance* yang dilakukan kelompok lain sehingga terbentuklah konflik.

Dari identifikasi sosial yang didapatkan dan gambaran akan orientasi dominasi, penulis akan melihat bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami oleh minoritas Koptik dalam mayoritas Muslim di Mesir. Dalam penelitian ini, penulis akan melihat fenomena diskriminasi menggunakan Teori Diskriminasi oleh Theodorson & Theodorson (1969). Theodorson & Theodorson berpendapat bahwasanya diskriminasi tidak hanya terjadi pada kelompok minoritas namun juga pada kelompok mayoritas. Minoritas yang dimaksud oleh Theodorson & Theodorson adalah kelompok-kelompok yang diakui berdasarkan perbedaan ras, agama, atau suku bangsa, yang mengalami kerugian sebagai akibat prasangka (*prejudice*).²² Dalam teori ini, minoritas juga menunjuk pada kategori perorangan misalnya wanita.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus. Strategi penelitian studi kasus dilakukan dengan cara menyelidiki suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu secara cermat dan mendalam. Kasus-kasus yang diselidiki dibatasi oleh waktu dan aktivitas. Peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan.²³ Penulis mengumpulkan data terbatas pada kelompok Koptik di Mesir dan Ahmadiyah di Indonesia yang akan diambil dari studi pustaka.

Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Konstitusi Negara Mesir dan Konstitusi Republik Indonesia. Sejak awal dibentuk, konstitusi kedua negara ini

²²George A. Theodorson and Achilles G. Theodorson, "A Modern Dictionary of Sociology" (1969).

²³John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage publications, 2017).

telah mengalami beberapa amandemen, penulis memfokuskan data pada naskah konstitusi terakhir dari Negara Mesir dan Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka yang didukung dengan data-data sekunder dan informasi dari berbagai media dan literatur.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan logis, penulis menyusun pembahasan dalam tesis ini ke dalam beberapa bab. Diawali dengan bab pertama yang berisi pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah dan kerangka metodologi yang diterapkan dalam pelaksanaan studi ini.

Selanjutnya, bab kedua membahas tentang sejarah konstitusi Mesir dan Indonesia serta uraian singkat terkait demografi kedua negara tersebut. Bab ini diawali dengan penjelasan penulis tentang sejarah yang mendasari pembentukan konstitusi Mesir dan Indonesia, perkembangan konstitusi tersebut setelah mengalami amandemen, dan dilanjutkan dengan pemetaan demografi populasi kedua negara. Analisis tentang dinamika perubahan konstitusi dan pergerakan demografi akan mengantarkan pembaca kepada pemahaman tentang konteks konstitusi dan kelompok minoritas dari kedua negara, yang akan menjadi topik utama dalam studi ini.

Bab ketiga memaparkan tentang pengaturan hak beragama dalam konstitusi Mesir dan Indonesia. Pembahasan ini meliputi tentang hak-hak warga negara yang diakomodir oleh konstitusi, khususnya terkait hak kebebasan beragama. Sedangkan analisis lebih lanjut tentang bagaimana implementasi dari kebijakan pada konstitusi tersebut dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari akan disampaikan pada bab empat.

Dalam bab ini, penulis menjelaskan bagaimana kebijakan dan hukum yang telah diatur di dalam konstitusi tersebut diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Penulis

memberikan contoh kasus pada dua kelompok agama minoritas yaitu Koptik di Mesir dan Ahmadiyah Indonesia. Terakhir, bab kelima berisi kesimpulan dari penelitian dan penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konstitusi haruslah dapat mengikuti perkembangan zaman, atau sebagai *living constitution*, agar terus disesuaikan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan-kebutuhan baru yang mungkin akan timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konstitusi Republik Indonesia dan Republik Arab Mesir, ketentuan tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama dinilai telah terakomodir dengan baik. Namun pada implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak ditemui beberapa pelanggaran HAM, khususnya terkait kebebasan beragama.

Sebagai kelompok minoritas Kristen di negara mayoritas Muslim, Koptik tidak memiliki suara sendiri. Keberlangsungan Koptik bergantung pada presiden Mesir yang menjabat dalam mempertahankan hak mereka sebagai bagian dari Mesir dan perlindungan komunitas Koptik dari kekerasan sektarian.

B. Saran

Isu HAM khususnya masalah perlindungan dan pengakuan dalam beragama telah terakomodir dengan baik dalam konstitusi kedua negara. Tugas terberat saat ini adalah bagi Pemerintah kedua negara untuk melindungi hak-hak tersebut dan bagaimana Pemerintah dapat memperkuat pemahaman terkait hak dan kewajiban kepada seluruh warga negara. Perkembangan paham-paham ideologi baru atau yang berbedas dari pemahaman ideologi pada kelompok masyarakat tertentu sering kali dijadikan alat oleh kelompok intoleransi untuk merusak dan memecah belah persatuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Rio Armanda, and Abdul Rasyid Saliman. "Model Pengakuan Hak Konstitusional Dalam Beragama (Studi Komparasi Menurut UUD 1945 dan Konstitusi Malaysia 1957)." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (April 26, 2019): 123.
- Asshiddiqie, Prof. Dr. Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media, Dan HAM*. Cetakan Kesua. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Atiya, Aziz Suryal. *The Copts and Christian Civilization*. University of Utah Press, 1979.
- Banjo, Omotayo O., and Kesha Morant Williams. *Contemporary Christian Culture: Messages, Missions, and Dilemmas*. Lexington Books, 2017.
- Carter, Barbara L. *The Copts in Egyptian Politics*. London [u.a]: Croom Helm, 1986.
- Central Agency for Public Mobilization and Statistic. "State Information Services (SIS)-Population." Accessed December 10, 2021. <https://www.sis.gov.eg/section/10/9400?lang=en-us>.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications, 2017.
- Darmadi, Dadi. "The Meccan Fatwas and the Globalized Discourse of Exclusion: The Case of Anti-Ahmadiyah Movements in Indonesia." *Heritage of Nusantara* 2, no. June 2013 (n.d.): 23–50.
- Dickinson, Eliot. "Coptic Christians in an Age of Globalization" 17, no. 1 (2018): 4.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. "Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021: Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit." Accessed December 11, 2021. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>.
- Fahmi, Georges. "The Coptic Church and Politics in Egypt." *Carnegie Middle East Center*. Accessed April 23, 2018. <https://carnegie-mec.org/2014/12/18/coptic-church-and-politics-in-egypt-pub-57563>.
- Gazi. "Menguji Pengaruh Identitas Sosial, Orientasi Dominasi Sosial, Persepsi Keterancaman Terhadap Dukungan Atas Kekerasan" (n.d.): 88.
- Hacker, H. M. "Women as a Minority Group." *Social Forces* 30, no. 1 (October 1, 1951): 60–69.
- Hasan, Noorhaidi, Maufur, Nina Mariani Noor, Euis Nurlaelawati, Halili Rais, Zudi Rahmanto, Moh Mufid, Najib Kailani, and Abdul Halim. *Membela Hak-Hak Masyarakat Rentan: HAM, Keragaman Agama, Dan Isu-Isu Keluarga*. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2021.
- Hulsman, Cornelis, and Ramez Atallah. "Egypt—the Church under Pressure." *Freedom of Belief and Christian Mission* (2015).
- Hulsman, Cornelis, Editor-in-chief Arab-West Report, and Studying Muslim-Christian. "Middle Eastern Christian Survival Strategies after the Arab Revolutions in 2011 with a Focus on Egypt" (n.d.): 25.

- Indonesia, Katolisitas. "Skisma Timur," n.d. Accessed April 23, 2018. <http://katolisitas-indonesia.blogspot.com/2012/07/skisma-timur.html>.
- Jermanová, Tereza. "Before Constitution-Making: The Struggle for Constitution-Making Design in Post-Revolutionary Egypt." *Acta Politica* 55, no. 4 (October 2020): 648–669.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Laman Resmi Republik Indonesia • Portal Informasi Indonesia." Accessed December 11, 2021. <https://indonesia.go.id/profil/agama>.
- Lang, Anthony F. "From Revolutions to Constitutions: The Case of Egypt." *International Affairs* 89, no. 2 (March 2013): 345–363.
- LEEDER, Simon Henry. *Modern Sons of Pharaoh: A Study of the Manners and Customs of the Copts of Egypt... Illustrated with Photographs, Etc.* Hodder & Stoughton, 1918.
- Leveugle, Samantha C. "The Copts and the Egyptian State: The Economic and Political Marginalization of the Coptic Christians of Egypt from Muhammad Ali to the Present" (n.d.): 12.
- Levin, Shana, P. J. Henry, Felicia Pratto, and Jim Sidanius. "Social Dominance and Social Identity in Lebanon: Implications for Support of Violence Against the West." *Group Processes & Intergroup Relations* 6, no. 4 (October 2003): 353–368.
- Louis, Wirth. "The Problem of Minority Groups." In *The Science of Man in the World Crisis*, 347–372, 1945.
- Mahkamah Konstitusi. "Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Indonesia." Last modified 2015. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>.
- Mahmood, Saba. "Religious Freedom, the Minority Question, and Geopolitics in the Middle East." *Comparative Studies in Society and History* 54, no. 2 (April 2012): 418–446.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI II Tahun 2005*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2006.
- . *Mengawal Akidah Umat: Fatwa MUI Tentang Aliran-Aliran Sesat Di Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- Marzuki, Suparman. "THE PERSPECTIVES OF THE CONSTITUTIONAL COURT ON HUMAN RIGHTS" 6, no. 3 (n.d.): 18.
- Media, Kompas Cyber. "6 Fakta di Balik Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang, Dipicu Rasa Kecewa hingga Dikecam Komnas HAM Halaman all." *KOMPAS.com*. Last modified September 3, 2021. Accessed December 13, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/09/04/060000878/6-fakta-di-balik-perusakan-masjid-ahmadiyah-di-sintang-dipicu-rasa-kecewa>.
- . "Rumah Ibadah Ahmadiyah Dirusak, Komnas HAM Desak Pemerintah Cabut SKB Nomor 3 Tahun 2008 Halaman all." *KOMPAS.com*. Last modified September 6, 2021. Accessed December 13, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/06/12581521/rumah-ibadah-ahmadiyah-dirusak-komnas-ham-desak-pemerintah-cabut-skb-nomor-3>.

- Michaelson, Ruth, and Harriet Sherwood. "It's a War on Christian': Egypt's Beleaguered Copts in Sombre Mood Before Papal Visit," April 2017.
- Misrawi, Zuhairi. "Kesadaran multikultural dan deradikalisasi pendidikan Islam: pengalaman Bhinneka Tunggal Ika dan Qabul al-Akhar." *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (January 1, 1970): 197.
- Noor, Nina Mariani. "Pencatatan Pernikahan Bagi Warga Muslim Minoritas: Hak Atas Administrasi." In *Membela Hak-Hak Masyarakat Rentan: HAM, Keragaman Agama, Dan Isu-Isu Keluarga*, 59–80. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2021.
- Persada, Syailendra. "Pemerintah Sintang Segel Masjid Ahmadiyah, Setara Desak Pusat Turun Tangan." *Tempo*. Last modified August 14, 2021. Accessed December 13, 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1494523/pemerintah-sintang-segel-masjid-ahmadiyah-setara-desak-pusat-turun-tangan>.
- Scott, Rachel M. "Constitution Making in Egypt." In *Recasting Islamic Law: Religion and the Nation State in Egyptian Constitution Making*, 61–82. New York: Cornell University Press, 2021.
- Sidanius, Jim, Nour Kteily, Shana Levin, Felicia Pratto, and Milan Obaidi. "Support for Asymmetric Violence among Arab Populations: The Clash of Cultures, Social Identity, or Counterdominance?" *Group Processes & Intergroup Relations* 19, no. 3 (May 2016): 343–359.
- Sidanius, Jim, and Felicia Pratto. *Social Dominance: An Intergroup Theory of Social Hierarchy and Oppression*. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 1999.
- Tajfel, Henri, and John C. Turner. "The Social Identity Theory of Intergroup Behavior." (2004).
- Theodorson, George A., and Achilles G. Theodorson. "A Modern Dictionary of Sociology" (1969).
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku I: Latar belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945*. Edisi Revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- United Nation (General Assembly. "International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)," 1966.
- Vaughn, Bruce. "Indonesia: Domestic Politics, Strategic Dynamics, and U.S. Interests" (n.d.): 39.
- Viljoen, Frans. "INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW A SHORT HISTORY" (2012): 5.
- Yoyo, Yoyo. "PENGARUH BAHASA ARAB TERHADAP IDENTITAS SOSIO-KULTURAL DAN KEAGAMAAN MASYARAKAT KOPTIK DI MESIR." *Jurnal CMES* 10 (2017).
- Yusuf, Slamet Efendi, and Umar Basalim. *Reformasi Konstitusi Indonesia: Perubahan Pertama UUD 1945*. Pustaka Indonesia Satu, 2000.
- "Constitution-SIS." Accessed December 11, 2021. <https://www.sis.gov.eg/section/10/2603?lang=en-us>.

“Copts of Egypt.” *Minority Rights Group*. Last modified June 19, 2015. Accessed December 10, 2021. <https://minorityrights.org/minorities/copts/>.

“(Dalam Gereja Katolik, Anglikan, Dan Ortodoks) Pendeta Yang Ditahbiskan Sebagai Peringkat Di Bawah Imam.” n.d.

“Egypt: Divorced from Justice: VIII. Egypt’s Obligations Under International Law.” Accessed January 26, 2022. <https://www.hrw.org/reports/2004/egypt1204/8.htm>.

“Egypt’s El-Sisi Lifts State of Emergency in Force since 2017 | News | Al Jazeera.” Accessed December 13, 2021. <https://www.aljazeera.com/news/2021/10/26/egypt-lifts-state-of-emergency-in-force-since-2017>.

“Emergency Law No. 162/1958.” Egypt Constitutional Law, 1958.

“End Closures and Prevent Demolition of Ahmadiyah Mosque.” *Human Rights Watch*, November 4, 2021. Accessed December 13, 2021. <https://www.hrw.org/news/2021/11/04/end-closures-and-prevent-demolition-ahmadiyah-mosque>.

“Konstitusi Republik Arab Mesir 1923,” n.d.

“Konstitusi Republik Arab Mesir 1971,” n.d.

“Konstitusi Republik Arab Mesir 2014,” n.d.

“Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” n.d.

“Pengadilan HAM Di Indonesia – Referensi HAM,” n.d. Accessed January 26, 2022. <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/pengadilan-ham-di-indonesia/>.

“Rapporteur Digest on Freedom of Religion or Belief (1986-2011).” United Nation Commision on Human Right, n.d.

“Tentang Komnas HAM.” Accessed January 26, 2022. <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas-ham.html>.

“Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights,” n.d.

“United Nations (UN) Charter, Article 68,” n.d.